

SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

3 April 2023

RDP dengan Komisi II DPR RI, Kepala Otorita IKN Sampaikan Perkembangan Pertanahan dan Tata Ruang IKN

JAKARTA—Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono didampingi Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe bersama seluruh jajaran eselon I OIKN hadir Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Senin (3/4/2023) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala OIKN sampaikan sejumlah perkembangan isu pertanahan dan tata ruang di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala OIKN menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare di IKN. “Ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi HPL,” tuturnya.

Progres saat ini sudah pada tahap verifikasi dan validasi kawasan hutan. Tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi barang milik negara (BMN) dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Selain itu, dari sisi tata ruang OIKN sedang menyiapkan sejumlah Peraturan Kepala (Perka) OIKN tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN. Dari total sembilan wilayah perencanaan (WP) di IKN, empat di antaranya sudah keluar yakni WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, sementara sisanya masih dalam proses legislasi.

Terkait pengadaan tanah di kawasan IKN, Kepala OIKN melaporkan ke Komisi II bahwa di KIPP 1A, Tim Pembebasan Lahan yang terdiri dari Kementerian PUPR, ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan OIKN sudah memproses pengadaan lahan sebanyak 330 bidang, yang mana 18 bidang sudah dibayar dan 312 bidang sedang diproses.

Sementara untuk pengadaan tanah di KIPP 1B dan 1C, saat ini proses perencanaan oleh Kementerian PUPR dan persiapan oleh Tim Pembebasan Lahan akan membebaskan sebanyak 128 bidang.

Selain itu, Kepala OIKN juga menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur masih dalam proses *on the track*. Tak hanya itu, OIKN juga telah menerima 167 *letter of interest* dari 16 negara. “Kami dalam proses menyeleksi mana saja yang sesuai dan serius untuk ikut membangun di IKN Nusantara,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Helmy Faishal Zaini menyampaikan dukungannya agar pembangunan IKN dapat terlaksana dengan baik. “Dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan Pak Bambang dan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini dan tentu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, anggota Komisi II DPR RI yang lain, A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra turut mengapresiasi pemaparan Kepala OIKN ke Komisi II DPR RI. “Sejalan dengan yang anggota sebelumnya sampaikan saya secara pribadi mendukung bagaimana Bapak menjadi mitra kerja kita,” ujarnya.

Dukungan dari anggota Komisi II DPR RI pun turut disampaikan oleh Guspari Gaus yang menegaskan bahwa OIKN dapat menyampaikan aspirasinya ke Komisi II DPR RI agar dapat ditindaklanjuti. “Bapak dapat koordinasi dengan pimpinan kami untuk rapat dengan Komisi II dalam rangka men-*support* langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Saya berharap kalau ada masalah tolong sampaikan kepada kami *insya Allah* kita akan carikan jalan keluar,” tegasnya.

“Kami sangat menyambut baik kalau Bapak/Ibu bisa menengok kami di sana. Bisa melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana kami bekerja, dan bagaimana situasi di lapangan tentunya jadi vitamin buat kami, jadi *booster* buat kami di tengah-tengah yang kami lakukan sekarang,” ungkap Kepala OIKN menyambut baik dukungan dari Komisi II DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama Komisi II DPR RI berencana akan melakukan kunjungan kerja ke IKN. “Setelah reses nanti, habis lebaran, masa sidang kelima kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangan,” ujarnya.

Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara

Narahubung: Sekretariat OIKN
(+62) 811-8115-8888

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022.

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas hampir 4x Jakarta yaitu kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare).

DOKUMENTASI FOTO

Sumber: Biro SDM dan Humas, Otorita Ibu Kota Nusantara





